

## DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo, 2009, **Manajemen Pemerintah Daerah**. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ajzen, I., 1991, *From Intentions to Action: A Theory of Planned Behavior*. Springer, New York.
- Arikunto, Suharjono Supardi, 2014, **Penelitian Tindakan Kelas**. Jakarta: Bumi Aksara.
- \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, 2010, **Penelitian Tindakan Kelas**. Jakarta: Bumi Aksara.
- Arjani, Ni Nengah S., Ni Luh, G.E.S., dan Made, A.W., (2017), *Pengaruh Motivasi, Moralitas, Dan Peran Perangkat Desa Terhadap Kepatuhan Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Dengan Sanksi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi*. Vol.7 No.1 Jurusan Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha.
- Ayunda, Winda Putri, (2015), *Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Pajak, Sikap Wajib Pajak, dan Tingkat Ekonomi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan Kontrol Petugas Kelurahan sebagai Variabel Moderasi*. Jurnal Ilmiah Akuntansi Vol.2 No.2 Fakultas Ekonomi Universitas Riau.
- Budiharto, Widodo, 2010, **Robotika: Teori & Implementasinya**. Yogyakarta: Andi.
- Chariri, A., dan Imam Ghozali, 2007, **Teori Akuntansi**. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Darwin, 2009, **Pajak Bumi dan Bangunan**. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Devano, Sony dan Siti Kurnia Rahayu, 2006, **Perpajakan Konsep, Teori dan Isu**. Jakarta: Prenada Media Group.
- Diana, Anastasia, Setiawati, Lilis, (2014), **Pepajakan Teori dan Peraturan Terkini**. Yogyakarta: Andi.
- Emzir, 2010, **Metodelogi Penelitian Pendidikan: Kuantitatif dan Kualitatif**. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ghozali, Imam, 2011, **Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS**. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- \_\_\_\_\_, 2016, **Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program IBM SPSS 23**. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gie, The Liang, 1989, **Pertumbuhan Pemerintahan Daerah Di Negara Republik Indonesia**. Dkajarta: Gunung Agung.
- Gujarati, Damodar, 2003, **Ekonometri Dasar**. Terjemahan: Sumarno Zain, Jakarta: Erlangga
- \_\_\_\_\_, Damodar, 2004, **Ekonometri Dasar**. Terjemahan: Sumarno Zain, Jakarta: Erlangga
- Hamid, Abdul, 2007, **Teori Belajar dan Pembelajaran**. Jakarta: Rineka Cipta.
- HAW, Widjaja, 2003, **Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh**. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ilyas, W. B., 2010, **Perpajakan Indonesia**. Jakarta: Salemba Empat.
- Imtikhanah, Sobrotul dan Nin Sulistyowati, (2010), *Faktor – Faktor Dalam Diri Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak PBB di Kabupaten Pekalongan*. Jurnal Majalah Neraca, Vol.6 No.2
- Isawati, Tri, (2016), *Pengaruh Tingkat Pendapatan, Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Pajak Serta Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Kasus Di Kelurahan Teluk Lerong Ilir, Kecamatan Samarinda Ulu)*. Fakultas Ekonomi Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.
- Jensen, Michael C., Dan W.H. Meckling., (1976), **Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure**. Journal of Financial Economics.
- Karim, Linus, (2002), **Hubungan Tingkat Pendapatan Kepala Keluarga dengan Kesadaran Membayar PBB**.
- Kuncono, Mudrajad, 2004, **Otonomi Daerah dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang**. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Mardiasmo, 2009, **Perpajakan, edisi revisi tahun 2009**. Yogyakarta: Andi.
- \_\_\_\_\_, 2016, **Perpajakan, edisi revisi tahun 2016**. Yogyakarta: Andi.
- \_\_\_\_\_, 2011, **Perpajakan, edisi revisi tahun 2011** .Yogyakarta: Andi.
- Nazir, Moh, 2009, **Metode Penelitian**. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 91 Tahun 2010 Tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 55 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 57 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penilaian Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi Dan bangunan Perdesaan Dan Perkotaan.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi No. 18 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi.
- Peraturan Daerah Provinsi Ibukota Jakarta Pasal 7-8 No. 11 Tahun 2010 Tentang Peraturan Perpajakan.
- Priantara, Diaz, 2016, **Perpajakan Indonesia**, Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Rahayu, Kurnia Siti, 2013, **Konsep dasar dan pedoman pemeriksaan akuntan publik**. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Rico, Muhammad, (2018), *Peranan Aparatur Kelurahan Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Terhadap Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Jati Mekar Kecamatan Kendari Kota Kendiri*. Universitas Halu Oleo.
- Rio, T.S., Irawan, S., Hermi, Y., (2015), *Pengaruh Aparatur Pemerintah Desa dan Pemahaman Masyarakat Terhadap Kesadaran Masyarakat Membayar PBB*. Vol.3 No.7 Universitas Lampung.
- Sanjadi, Alfian Nurja, (2016), *Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan oleh Perangkat Desa dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat dalam*

*Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Purwasari Kecamatan Kawali Kab.Ciamis Tahun 2016.* Universitas Galuh.

Santoso, S., 2015, **SPSS20 Pengolahan Data Statistik di Era Informasi.** Jakarta: PT. Alex Media Komputindo.

Sanusi, Anwar. 2016. **Metodologi Penelitian Bisnis.** Jakarta: Salemba Empat.

Sapriadi, Doni, (2013), *Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Sanksi Pajak dan Kualitas Pelayanan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan.* Artikel Ilmiah Universitas Negeri Padang.

Setiawan, A. B., dan Rohmatiani, Y., (2018), *Wajib Pajak dan Kepatuhan Dalam Membayar PBB P2.* Jurnal Akunida Vol.4 No.2 Fakultas Ekonomi Universitas Djuanda Bogor.

Shiddiq, Ash Muhammad, (2011), *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Di Tangerang Selatan.* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta.

Siahaan, Marihot P., 2010, **Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Edisi revisi.** Jakarta: Rajawali.

Soekanto, Soerjono, 2002, **Sosiologi Suatu Pengantar.** Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Soemitro, Rochmat, 1989, **Pajak Bumi dan Bangunan.** Bandung: PT.Eresco.

Stephana, Dyah Ayu, (2008), *Sistem Kompensasi Bagi Pemeriksa Pajak: Mereduksi Tax Evasion, Tinjauan Dalam Perspektif Teori Keagenan.* Fakultas Ekonomi UNIKA Soegijapranata Semarang.

Suandy, Erly, 2014, **Hukum Pajak.** Yogyakarta: Salemba Empat.

Sugiyono, 2017, **Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.** Bandung: Alfabeta.

\_\_\_\_\_, 2015, **Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.** Bandung: Alfabeta.

\_\_\_\_\_, 2013, **Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.** Bandung: Alfabeta.

\_\_\_\_\_, 2010, **Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.** Bandung: Alfabeta.

\_\_\_\_\_, 2009, **Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.** Bandung: Alfabeta.

- \_\_\_\_\_, 2004, **Metode Penelitian**. Bandung: Alfabeta.
- Sunyoto, Sunyato, 2011, **Analisis Regresi dan Uji Hipotesis**. Yogyakarta: Caps.
- Supardi, 2014, **Kinerja Guru**. Jakarta: PT Raja Grafindo. Persada.
- Suryabrata, Sumadi, 1991, **Metode Penelitian**. Jakarta: CV. Rajawali.
- Tersiana, Andra, 2018, **Metode Penelitian**. Yogyakarta: Start Up.
- Tjahjono, Achmad dan Muhammad Fakhri Husein, 2005, **Perpajakan edisi 3**. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Undang – Undang Republik Indonesia, Pasal 1 No. 6 Tahun, 2014, Tentang Desa.
- Undang – Undang Republik Indonesia, Pasal 1 No. 3 Tahun, 2014, Tentang Perangkat Desa.
- Undang – Undang Republik Indonesia, Pasal 77-84 No. 23 Tahun, 2009, Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang – Undang Republik Indonesia, No. 28 Tahun, 2009, Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang – Undang Republik Indonesia, No. 28 Tahun, 2007, Tentang Ketentuan Umum Perpajakan.
- Undang – Undang Republik Indonesia, Pasal 1 No. 28 Tahun, 2007, Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang – Undang Republik Indonesia, Pasal 14 No. 6 Tahun, 2007, Tentang Sanksi Perpajakan.
- Undang – Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharan Negara.
- Undang – Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Undang – Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang – Undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Undang – Undang Republik Indonesia, No. 17 Tahun, 2003, Tentang Keuangan Negara.
- Undang – Undang Republik Indonesia, No. 34 Tahun, 2000, Tentang Pajak Daerah.

Undang – Undang Republik Indonesia, No. 22 Tahun, 1999, Tentang Otonomi Daerah.

Undang – Undang Republik Indonesia, No. 12 Tahun, 1994, Tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Undang – Undang Republik Indonesia, No. 12 Tahun, 1985, Tentang Pajak Bumi dan Banguna.

Waluyo, 2011, **Perpajakan Indonesia**. Jakarta: Salemba Empat.

Wiguna, Yoga Haqim, (2018), *Pengaruh Sanksi Pajak, Tingkat Pendapatan Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan PBB Dengan Religiusitas Sebagai Pemoderasi*. Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.

<http://www.sukabumiupdate.com>. Diakses pada september 2020.

<http://www.sukabumikab.go.id>. Diakses pada juni 2021.

<http://www.bapenda.sukabumikab.go.id>. Diakses pada juni 2021.

